

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1996.

Achmad Ali, Mengungkap Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Ackerman “Ekonomi-Politik-Korupsi” dalam Elliot, Kimberly Ann, Korupsi dan Ekonomi Dunia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1991.

Adam Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Alumni, 2008.

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Andi Hamzah, Pemberantasan korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Andi Sofyan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Yogyakarta, Rangkang Education, 2013.

Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

B. Arief Sidharta, Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Bambang Poernomo, Pokok-pokok Tata Cara Peradilan Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 2004.

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998.

Chaerudin Dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Jakarta, 2008.

Chaerul Amir, S.H., M.H., Kejaksaan Memberantas Korupsi, Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis, Pro deleader, Jakarta, 2014.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009

- Darji Darmonodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Denny Indrayana, *Negeri Para Mafioso Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Fernando M. Manulang, *Hukum Dalam Kepastian, Prakarsa*, Bandung, 2007.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta, 2006.
- I.G.M. Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Jan Michiel Otto dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.
- Jeremy Pope, *Bentuk, Sifat dan Anatomi Korupsi*, Bandung,, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Sekelumit tentang penyadapan dalam hukum positif di Indonesia*, PT. Nuansa Aulia, Bandung, 2013
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Alumni, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya hukumnya menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta, 1983

- Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Muhammad Nur Al-Azhar, *Digital Forensic, Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Salemba Infotek. Jakarta, 2012
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta Pradnya Paramita, 2001.
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995,
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sigid Suseno, Yurisdiksi Tindak Pidana Siber. Refika Aditama, Bandung: 2012.
- Soepomo, Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta 2002.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Sulaikhan Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Syed Hussain Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi. LP3ES, Jakarta, 1997.
- Tolib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana, (Perkembangan dan pembaharuan di Indonesia), Setara Press, Malang, 2014.
- Wiryo Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana, Sumur Bandung, Bandung, 1980.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kementrian Kehakiman Republik Indonesia, Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen ke-empat dalam penjelasan UUD 1945.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

### C. Internet

Widodo Tresno Novianto. Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi dan Prospeknya Bagi Penanggulangan Korupsi di Indonesia, Jurnal Yustisia Edisi nomor 70 Januari –April 2007, FH UNS, Surakarta, 2007

Dimas Jarot Bayu “ *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik Tujuh peringkat*”, Diakses pada tanggal 27112019.

Rezky Mahayu Sekarsari, Legalitas Alat bukti Elektronik hasil Penyadapan dalam Rencana Penjebakan Sebagai Upaya Penegakan Hukum, Jurist –Diction Vol. 1 No.2, November 2018 diakses pada tanggal 27112019

Sasongko Adi Nugroho, Analisis Kedudukan dan kekuatan Pembuktian digital evidence dalam pembuktian perkara korupsi , diakses pada tanggal 21112019.

Erasmus Abraham Todo Napitupulu, “*Melihat Pengaturan Tindak Pidana penyadapan dalam R KUHP*” diakses pada tanggal 08122019

Supriyadi Widodo Eddyono , *Komentar atas Pengaturan Penyadapan Dalam Rancangan KUHP*, diakses pada tanggal 08122019

Arju Mulia, “*Tinjauan yuridis pasal 26a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan no. 161 PK/Pid.Sus/2010)*” diakses pada tanggal 06022020.

Glendoh, *Kejahatan Korupsi*, Makalah, Jakarta, 1997

Ebta Setiawan. Arti dan Makna Pembuktian. dalam [http : // KBBI.web.id/arti](http://KBBI.web.id/arti) atau makna pembuktian, diakses pada tanggal 06012020.

Wasingatu Zakiah “*Penegakan Hukum Undang-Undang Korupsi*” Makalah, Jakarta,

Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Progresif: Studi tentang Penyelidikan, Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi.*, Jakarta, Masyarakat Transparansi Indonesia bekerja sama dengan National Legal Reform Porogram (NLRP), 2009.

Asrizal, *Digital Forensik-Apa dan Bagaimana*, diakses pada tanggal 25022020 “ *Mengatur ulang Hukum Penyadapan Indonesia*”, diakses pada tanggal 20112019

“*Alasan KPK sadap Anggodo*” [vivanews.com](http://vivanews.com), diakses pada tanggal 20112019

“*Kasus Suap Penanganan Sengketa Pilkada Akil Mochtar yang Menggurita*” diakses pada tanggal 08122019.

*“Aspek Hukum Tindakan Penyadapan”* , diakses pada tanggal 23012020

“Konvensi bagi Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dan Kebebasan Fundamental (1958) Ditandatangani di Roma, 14 November 1950 (ETS No. 005). Berlaku pada 3 September 1958”. Dimuat , diakses pada tanggal 23012020

“Kovenan Internasional Hak Sipil Dan Politik”, dimuat dalam <https://www.kontras.org> diakses pada tanggal 23012020

*Negara Rugi Rp 2,3 Triliun di Proyek E-KTP, KPK Yakin Hanya Kembali Setengahnya*, [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2017, diakses pada 09032020.

*KPK Tak Akan Musnahkan Hasil Sadapan 36 Kasus yang Dihentikan*, [www.detiknews.com](http://www.detiknews.com), Selasa 25 Feb 2020, diakses pada tanggal 14032020.

